



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN KEUANGAN A U D I T E D

TAHUN ANGGARAN 2025 PERODE 14 TA 2025

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Berdasarkan : PMK Nomor : 222/PMK.05/2016

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah - Pagaruyung Telp. (0752) 574561 Fax. 574677

BATUSANGKAR - SUMATERA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

Berdasarkan :

PMK Nomor : 222/PMK.05/2016 Tanggal 30 Desember 2016

**Jln. Sultan Alam Bagagarsyah - Pagaruyung Telp. 0752-574561 Fax. 574677
Batusangkar – Sumatera Barat**

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025

Untuk Periode 14 Yang Berakhir 31 Desember 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah - Pagaruyung Telp. 0752-574561 Fax. 574677
Batusangkar – Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batusangkar, 28 April 2026

Sekretaris,

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran



BENNY RINALDO, SH

NIP. 19750408 200902 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Direviu	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	Viii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
Laporan Realisasi Anggaran	1
Neraca	1
Laporan Operasional (LO)	1
Laporan Perubahan Ekuitas	2
Catatan Atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	8
A.5. Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan atas Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.1. Pendapatan	14
B.2. Belanja	15
B.3. Belanja Pegawai	17
B.4. Belanja Barang	17
B.5. Belanja Modal	18
B.5.1. Belanja Modal Tanah	19
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20
B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	20
B.5.5. Belanja Modal Lainnya	21
B.6. Belanja Bantuan Sosial	21

	Hal
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	22
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	22
C.3. Kas pada Badan Layanan Umum	22
C.4. Kas Lainnya dan Setara Kas	23
C.5. Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum	23
C.6. Piutang PNB	24
C.7. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	24
C.8. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	25
C.9. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	25
C.10. Beban Dibayar di Muka	26
C.11. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	26
C.12. Persediaan	26
C.13. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	27
C.14. Tagihan Penjualan Angsuran	27
C.15. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	27
C.16. Tanah	28
C.17. Peralatan dan Mesin	28
C.18. Gedung dan Bangunan	29
C.19. Jalan, Irigasi dan Jaringan	29
C.20. Aset Tetap Lainnya	30
C.21. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	30
C.22. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
C.23. Aset Tak Berwujud	30
C.24. Aset Lain-Lain	31
C.25. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31
C.26. Uang Muka dari KPPN	31
C.27. Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.28. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	32
C.29. Utang Jangka Pendek Lainnya	32

	Hal
C.30. Pendapatan Yang Diterima Dimuka	32
C.31. Beban Yang Masih Harus Dibayar	32
C.32. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	32
C.33. Ekuitas	32
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	33
D.1 Pendapatan	33
D.2 Beban Pegawai	33
D.3 Beban Persediaan	34
D.4 Beban Barang dan Jasa	34
D.5 Beban Pemeliharaan	35
D.6 Beban Perjalanan Dinas	36
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	36
D.8 Beban Bantuan Sosial	37
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	38
D.11 Kegiatan Non Operasional	38
D.12 Pos Luar Biasa	39
E. Penjelasan Atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
E.1. Ekuitas Awal	40
E.2. Surplus (Defisit) LO	40
E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	40
E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset	40
E.3.3 Koreksi Nilai Aset	40
E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	40
E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	41
E.3.6 Koreksi Lain Lain	41
E.4. Transaksi Antar Entitas	41
E.4.1 DDEL Ditagihkan ke DKEL	42
E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar	42

	Hal
E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Hibah	42
E.5. Ekuitas Akhir	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
F.1 Kejadian - Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	43
F.2 Pengungkapan Lain - Lain	43
Lampiran A.1	45
Lampiran A.2	46

DAFTAR LAMPIRAN**Lamp**

Catatan Atas Laporan BMN Tahun 2025	1
DIPA Tahun 2025	2
POK Tahun 2025	3
Neraca Tahun 2025	4
Neraca Percobaan Tahun 2025	5
Laporan Operasional Satker Tahun 2025	6
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025	7
Laporan Realisasi Anggaran Satker Tahun 2025	8
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025	9
Realisasi Pengembalian Belanja Tahun 2025	10
Realisasi Pendapatan Tahun 2025	11
Realisasi Pengembalian Pendapatan Tahun 2025	12
Register Transaksi Harian (RTH) Tahun 2025	13
Surat Izin Pembukaan Kembali Rekening APBN	14
Pemeriksaan Kas dan Tutup Kas Tahun 2025	15
LPJ Bendahara Pengeluaran Tahun 2025	16
Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Tahun 2025	17
Bukti Setoran Sisa Uang Persediaan (UP) Tahun 2025	18
Bukti Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun 2025	19
BAR Saiba dan Lampiran Tahun 2025	20
BAR BMN dan Lampiran Tahun 2025	21
BAR Internal 2025	22
Persediaan Tahun 2025	23
Laporan BMN Tahun 2025	24
Data Kepegawaian Tahun 2025	25
SK Pengelola Keuangan 2025	26

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk tahun anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Batusangkar, 26 Januari 2026

Sekretaris,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



BENNY RINALDO, SH

NIP. 19750408 200902 1 005



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Jalan Sultan Alam Bagagsyah Pagaruyung - Batusangkar

Telp : 0752 - 574561

Fax : 0752 - 574677

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batusangkar, 26 Januari 2026

Sekretaris,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



BENNY RINALDO, SH

NIP. 19750408 200902 1 005

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tanah Datar Per 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 73.763.550,- atau mencapai 100 % dari estimasi pendapatan- LRA sebesar Rp. 0,- Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.630.271.255,- atau mencapai 99.95 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.633.616.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 655.273.675,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,-, Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 655.273.675,- Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar Rp. 0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 655.273.675,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan jumlah beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp. 6.327.997.732,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (6.327.997.732,-). Surplus/Defisit Kegiatan non operasional Lainnya sebesar Rp. 73.763.550,- dan Pendapatan dari kegiatan non operasional Lainnya Sebesar Rp. 0,- untuk beban pelapasan aset non lancar Sebesar Rp. 73.763.550,- Jumlah Surplus/(deficit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,- defisit Pos Pos Luar Biasa masing - masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Sehingga terdapat pencatatan Tahun Anggaran 2025 Surplus/(defisit) LO sebesar Rp. (6.254.234.182,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 6.878.647.179,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp (6.254.234.182,-).. dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3.669.870.489,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 12.496.977.266,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan Basis Akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Anng	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	0	-	-	0
Jumlah Pendapatan		0	0	-	0
Belanja	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	3,401,421,000	3,400,872,096	100	2,749,633,777
Belanja Barang	B.4	3,195,293,000	3,193,260,999	100	63,323,538,646
Belanja Modal	B.5	36,902,000	36,138,160	98	278,806,000
Belanja Sosial	B.6	-	-	-	-
Jumlah Belanja		6,633,616,000	6,630,271,255	100	66,351,978,423

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA

NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Pada BLU	C.3	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	0	6,525,647,027
Investasi jangka Pendek BLU	C.5	0	0
Piutang PNB	C.6	0	0
Bagian Lancar TP/ TGR	C.7	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.8	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.9	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.10	0	96,875,625
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.11	0	0
Persediaan	C.12	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	6,622,522,652
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan TP/ TGR	C.13	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.15	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
Aset Tetap			
Tanah	C.16	0	0
Peralatan dan Mesin	C.17	2,785,510,909	2,594,772,749
Gedung dan Bangunan	C.18	317,728,000	317,728,000
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.19	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.20	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.21	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.22	(2,447,965,234)	(2,055,324,568)
Jumlah Aset Tetap		655,273,675	857,176,181
Aset Lainnya			
Aset Tidak Berwujud	C.23	0	0
Aset Lain-lain	C.24	225,876,160	225,876,160
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.25	(225,876,160)	(225,876,160)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		655,273,675	7,479,698,833
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.26	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.27	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.28	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.30	0	0
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.31	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang jangka Panjang Dalam Negeri	C.32	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			
Ekuitas			
Ekuitas	C.33	655,273,675	7,479,698,833
JUMLAH EKUITAS		655,273,675	7,479,698,833
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		655,273,675	7,479,698,833

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1	-	-
Pendapatan PNPB Lainnya		-	-
Pendapatan BLU		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,400,872,096	2,749,633,777
Beban Persediaan/Modal	D.3	36,138,160	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,573,645,529	56,550,613,838
Beban Pemeliharaan	D.5	49,630,898	108,011,200
Beban Perjalanan Dinas	D.6	569,984,572	6,017,995,188
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	202,407,689
Beban Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		6,630,271,255	65,628,661,692
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-	65,628,661,692
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Penadapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar		-	5,300,300
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	5,300,300
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	5,300,300
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL LAINYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non operasional Lainnya		-	-
Beban dari kegiatan non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	-
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR LAINNYA		-	5,300,300
SURPLUS/DEFISIT LO		-	65,633,961,992

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	6,878,647,179	12,243,644,630
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6,254,234,182)	(69,086,138,431)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3,639,009,811)	11,266,500
Penyesuain Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	-	11,266,500
Koreksi Lain Lain	E.3.5	(3,639,009,811)	-
JUMLAH		(3,639,009,811)	11,266,500
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		3,669,870,489	63,732,407,480
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(6,223,373,504)	(5,364,997,451)
EKUITAS AKHIR		655,273,675	6,878,647,179

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPU Kabupaten Tanah Datar

UUD 1945 pasal 22 E menyatakan bahwa **"Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri"**. Amanat konstitusi tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
2. Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, telah disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2025 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Rencana Strategis (Renstra) KPU tahun 2015-2025 disusun sebagai acuan bagi :

1. Penyusunan Renstra unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum;
3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat dan Daerah (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya ;
4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum.
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3 Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengaku : dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang

dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

-) Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan *atau* Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :
-) Pendapatan Non Kegiatan Operasional Lainnya
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
-) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
-) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

-) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
-) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga

ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain Lain pada pos Aset Lainnya
-) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang***d. Piutang Jangka Panjang**

-) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
-) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya***e. Aset Lainnya**

-) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 -) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 -) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
 -) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan pada tahun anggaran 2024 ini, KPU Kabupaten Tanah Datar telah menerima 14 (empat belas) kali Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pagu anggaran atas adanya kegiatan tambahan tahapan pemilu sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2,692,674,000	3,401,421,000
Belanja Barang	398,571,000	2,795,195,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	-	36,902,000
Pinjaman dan Hibah		-
Jumlah Belanja	3,091,245,000	6,233,518,000

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah Rp. 0,-

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan hibah uang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Pendapatan Sebesar Rp. 0,-

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa/Lelang	-	-	
Pendapatan Hibah	-	-	
Jumlah	-	-	

Realisasi Pendapatan hibah Tahun 2025 sebesar Rp.0,- dan realisasi hibah per 31 desember 2025 Rp. 0,- sedangkan Tahun 2024 pendapatan Hibah Rp. 0,- dan untuk realisasi pendapatan dari PNBP pada Tahun 2025 sebesar Rp. 73.763.550,- dan realisasi pendapatan dari PNBP Tahun 2024 Rp. 555.475 ,-

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun 2025 dan Tahun 2024*

URAIAN	REALISASI T.A 205	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	1
Jumlah Pendapatan	-	-	1

*Realisasi Belanja
Rp. 6.630.271.255,-*

B.2. Belanja

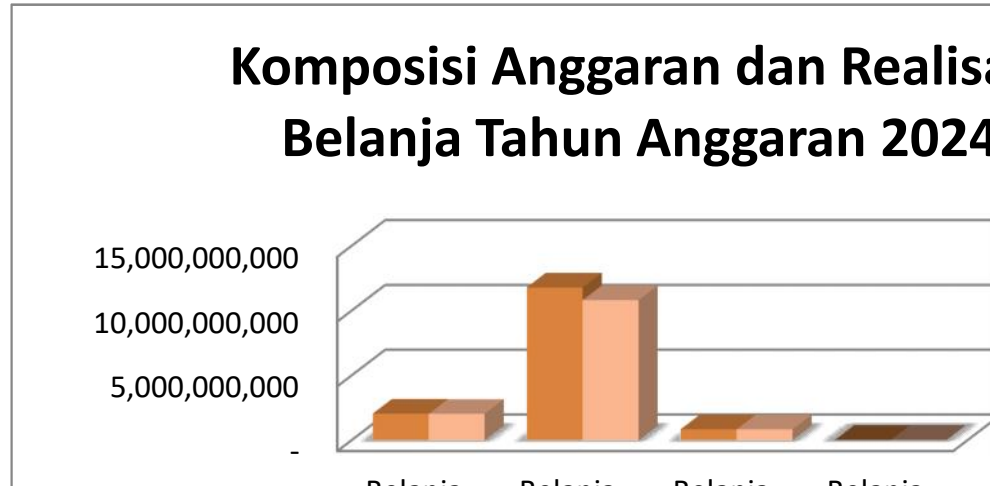
Realisasi belanja instansi pada T.A 2025 adalah sebesar Rp. 6.630.271.255,- atau 99.95 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 6.633.616.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

T.A 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3,401,421,000	3,400,872,096	100
Belanja Barang	3,195,293,000	3,193,260,999	100
Belanja Modal	36,902,000	36,138,160	98
Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Koto	6,633,616,000	6,630,271,255	100
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja	6,633,616,000	6,630,271,255	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk T.A 2025 adalah sebagai berikut :

*Rincian Belanja Berdasarkan Program
T.A 2025*

URAIAN	2025		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2,887,703,000	2,886,637,216	99.96
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3,745,913,000	3,743,634,147	99.94
Total Belanja	6,633,616,000	6,630,271,363	99.95

Realisasi Belanja T.A 2025 terdapat jauh berbebada dari realiasasi T.A 2024 dimana realisasi 99.95 % mengalami peningkatan dibandingkan pada T.A 2025. Sebesar 94,65 % Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. Tidak Adanya tahapan Pemilu Pada Tahun Anggaran 2025
2. Pada Tahun Anggaran 2025 Tidak Mendapatkan dana tambahan dan adanya efesiensi dari pemerintah pusat

*Perbandingan Realisasi Belanja
T.A 2025 dan T.A 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,400,872,096	2,749,633,777	-
Belanja Barang	3,193,260,999	63,323,536,646	-
Belanja Modal	36,138,160	278,506,000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
JUMLAH BELANJA	6,630,271,255	66,351,676,423	(90.01)

*Belanja Pegawai
Rp. 3.400.872.097,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.400.872.096,- dan Rp. 2.749.633.777,- atau terjadi Kenaikan sebesar (25,45) % dari TA 2024. Ini disebabkan adanya penambahan CPN dan PPPK yang di angkat di Tahun Anggaran 2025.

*Perbandingan Belanja Pegawai
T.A 2025 dan T.A 2024*

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,400,872,096	2,749,633,777	23.68
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3,400,872,096	2,749,633,777	23.68
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	3,400,872,096	2,749,633,777	23.68

*Belanja Barang
Rp. 3.193.260.999,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.193.260.999,- dan Rp. 63.323.536.646,- Realisasi tersebut mengalami Penurunan untuk persentase yang sebesar 1000 % dari realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal tersebut disebabkan oleh tidak Dalam Masa kegiatan tahapan pemilu.

*Perbandingan Belanja Barang
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	2,573,645,529	60,931,180,777	(95.78)
Belanja Pemeliharaan	49,630,898	45,679,980	8.65
Belanja Barang Persediaan	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	569,984,572	2,346,677,889	(75.71)
JUMLAH BELANJA	3,193,260,999	63,323,538,646	(94.96)

*Belanja Modal
Rp. 36.138.160,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 36.138.160,- dan Rp. 278.506.000,- Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 Merupakan Penunjang kegiatan Operasional Tahun 2025 di mana dalam pengadaan berupa Mobiler untuk kebutuhan CPNS dan PPPK Tahun 2025.

*Perbandingan Belanja Modal
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,138,160	278,506,000	(87)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
JUMLAH BELANJA KOTOR	36,138,160	278,506,000	-
Pengembalian	-	-	-
JUMLAH BELANJA	36,138,160	278,506,000	100.00

Belanja Modal
Tanah Rp. 0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Aangatan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Karena pada satuan kerja KPU Kab Tanah Datar, Belum memiliki aset tanah maupun bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 36.130.160,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 36.138.160,- dan Rp. 278.506.000,- atau mengalami Penurunan 16 %.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,130,160	278,506,000	-
Jumlah Belanja Kotor	36,130,160	278,506,000	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	36,130,160	278,506,000	-

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp. 0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sama nol persen dibandingkan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp. 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 sama sebesar 0 % dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024

Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi pagu anggaran belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2025

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Modal
Lainnya Rp. 0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 sama sebesar 0 % dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0*

B.6 BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal 31 desember 2025 pada neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2025 dan TA 2024*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening bank	-	-
Jumlah	0	0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2025 dan TA 2024*

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas pada BLU
Rp. 0

C.3 Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Rincian Kas di BLU

TA 2025 dan TA 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	-	-
Rekening bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp. 0,-

C.4 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 6.622.522.652,-

Kas Ini Berupa Hibah dari Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP / TUP dan Hibah kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

TA 2025 dan TA 2024

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	6,622,522,652
Jumlah	-	6,622,522,652

C.5 Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum

Investasi
Jangka
Pendek pada
BLU Rp. 0

Investasi Jangka Pendek pada BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan serta surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Rincian Investasi Jangka Pendek pada BLU, disajikan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU

TA 2025 dan TA 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Deposito	-	-
SBN	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB
Rp.0**C.6 Piutang PNB**

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Piutang PNB

TA 2025 dan 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan antara lain berasal dari piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR Rp.0**C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,- Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNB

TA 2025 dan 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Bagian Lancar TP	-	-
Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
TPA Rp.0

C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Lancar
Rp.0

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	
Kurang Lancar	-	-	
Diragukan	-	-	
Macet	-	-	
Jumlah	-		
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	
Kurang Lancar	-	-	
Diragukan	-	-	
Macet	-	-	
Jumlah	-		
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	
Kurang Lancar	-	-	
Diragukan	-	-	
Macet	-	-	
Jumlah	-		
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		

Beban Dibayar
di Muka Rp.0,-

C.10 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 96.875.625,- ini merupakan Kontrak Gudang Penyimpanan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kontrak gudang ini berdurasi 1 Tahun dari Oktober 2023 s/d Oktober 2025

Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal

neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka

TA 2025 dan 2024

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban yang Dibayar di Muka	-	96,875,625
Jumlah	-	96,875,625

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp.0*

C.11 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 2025 dan 2024

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan yang Harus Diterima	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp. 0,-*

C.12 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Tidak ada bertambahnya persediaan di Tahun Anggaran 2025 ini disebabkan tidak adanya Kebutuhan untuk Pemilu Tahun 2025 berupa Kebutuhan Perlengkapan TPS Kotak Bilik, Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Tidak adanya persediaan pada tanggal pelaporan .

TP/TGR Rp. 0,-

C.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp. 0

C.14 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang Rp. 0

C.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan	0	0,00%	0
Macet	0	0,00%	0
Jumlah	0		0
Tagihan PA			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan	0	0,00%	0
Macet	0	0,00%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0		0

Tanah Rp 0

C.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,-. atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	Rp.	0
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp.	0
Hibah	Rp.	0
Reklasifikasi	Rp.	0
Mutasi kurang:	Rp.	0
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp.	0
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	-

Peralatan dan
Mesin Rp
2.785.510.909,-

C.17 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah Rp 2.785.510.909,- dan Rp 2.594.772.749,-

Mutasi Nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	(2,447,965,234)
Mutasi tambah:	Rp. 0
Pembelian	Rp. 0
Hibah	Rp. 0
Reklasifikasi	Rp. 0
Mutasi kurang:	Rp. 0
Revaluasi aset Tetap	Rp. 0
Penghapusan	Rp. 0
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2,447,965,234)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp (2,447,965,234)

Gedung dan
Bangunan Rp
317.728.000,-

C.18 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 317.728.000,- dan Rp 317.728.000,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2025	Rp 317,728,000
Mutasi tambah:	-
Pengembangan nilai aset	-
Pengembangan melalui KDP	-
Mutasi kurang:	-
-	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 317,728,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 317,728,000

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp 0

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Tidak ada mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan

Aset Tetap
Lainnya Rp 0

C.20 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Tidak ada mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan.

KDP Rp 0

C.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), baik itu per 31 Desember 2025 maupun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Tidak ada mutasi transaksi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal pelaporan.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp
-1.852.916.879,-

C.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp (1.852.916.879,-) dan Rp (2.028.967.170,-)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-1.852.916.679	-1.704.089.659	-148.827.020
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		Rp (1.852.916.679)	Rp (1.704.089.659)	Rp (148.827.020)

Aset Tak
Berwujud Rp.0

C.23 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) baik itu per 31 Desember 2024 maupun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Tidak ada mutasi nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal pelaporan

Aset Lain-Lain
Rp 0,-

C.24 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 0- dan Rp. 0,-

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2024	
Mutasi tambah:	Rp -
Pembelian	Rp -
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	Rp -
Saldo per 31 Desember 2024	Rp -
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp -

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain tidak ada. rincian aset lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp
(225.876.160,-)*

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 2024 adalah masing-masing Rp (225.876.160,-) dan Rp (225.876.160,-) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-lain	Rp 225,876,160	Rp 225,876,160	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp 225,876,160	Rp 225,876,160	Rp -

*Uang muka dari
KPPN Rp. 0*

C.26 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan per 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Muka (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 0,-*

C.27 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0- dan Rp. 0-

Tidak ada Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Ini merupakan jasa giro bulan desember pada rekening penampung hibah serentak tahun 2025.

*Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang Rp. 0*

C.28 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pembelian peralatan dan mesin, yang jatuh tempo pembayarannya dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp.0,-*

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

*Pendapatan
Yang Diterima
Dimuka Rp. 0*

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan yang Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/ jasa belum diserahkan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp. 0*

C.31 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-,

Merupakan bila ada kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Berupa Sewa Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2025

*Utang Jangka
Panjang Dalam
Negeri Rp. 0*

C.32 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

*Ekuitas Rp.
655.273.675,--*

C.33 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 655.273.675,- dan Rp.7.479.698.833,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan**

Pendapatan
PNBP Rp 0

Jumlah Pendapatan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 pada KPU Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun 2023 dan Tahun 2022*

URAIAN	Rp	4	TH 2023	%NAIK (TRN)
Pendapatan PNBP Lainnya				
Pendapatan Jasa				
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	-	-	-	-
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa	-	-	-	-
Pendapatan Lain-lain				
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Lalu	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan BLU				
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan BLU	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Beban Pegawai
Rp.
2.530.190.383,-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.530.190.383,-** dan **Rp2.590.493.761,-** dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Beban Pegawai
Tahun 2024 dan Tahun 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji/Tunjangan PNS	2,530,190,383	2,590,493,761	(2.33)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	100.00
Jumlah	2,530,190,383	2,590,493,761	(2.33)

Beban
Persediaan Rp

D.3 Beban Persediaan

0,-

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 190.992.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan

Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	-	190,992,000	(100.00)
Jumlah	0	190,992,000	(100.00)

Beban Jasa Rp
15.752.621.403,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 15.752.621.403,-** dan **Rp. 462.445.121,-** Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa

Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	-	317,345,121	(100)
Beban Honor Satua Kerja	-	-	#DIV/0!
Beban Barang Operasional Lainnya	15,752,621,403	-	#DIV/0!
Beban Bahan	-	13,000,000	(100)
Beban Honor Satua Kerja Output Kegiatan	-	81,600,000	(100)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	-	22,000,000	(100)
Beban Langganan Telepon	-	400,000	(100)
Beban Langganan Air	-	1,500,000	(100)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	23,000,000	(100)
Beban Sewa	-	-	100
Beban Jasa Penanganan Covid 19	-	-	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	-	-	100
Beban Non Operasional Penanganan Covid 19	-	-	100
Jumlah	15,752,621,403	458,845,121	3,333

Beban
Pemeliharaan
Rp
128.960.150,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 128.960.150,- dan Rp . 95.303.950,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan

Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	3,855,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,960,150	91,448,950	41.02
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	128,960,150	95,303,950	35.31

Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
1.074.097.025,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 2024 dan per 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.074.097.025- dan Rp 844.808.319- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1,074,097,025	844,808,319	27
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	100
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	#DIV/0!
Jumlah	1,074,097,025	844,808,319	27.14

Beban Barang
Untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat
Rp.-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Tahun 2024 dan Per Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan yang diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin yang diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	-	-
Jumlah	-	-	-

) Untuk tahun anggaran 2024 KPU Kab Tanah Datar ada memiliki beban barang untuk di serahkan ke masyarakat.

Beban Bantuan
Sosial Rp 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau Jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial

Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	0	0	-

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.578.939.346-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.(578.939.346,-) dan Rp. (731.182.396,-) dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,106,046,370	2,028,967,170	3.80
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	317,728,000	317,728,000	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,852,916,879)	(1,704,089,659)	8.73
Jumlah Penyusutan	570,857,491	642,605,511	(11.17)
	-	-	
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	578,939,346	731,182,396	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	(578,939,346)	(731,182,396)	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	570,857,491	642,605,511	(11.17)

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tahun 2024 dan Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	0%
Jumlah	-	-	0%

Surplus/ Defisit
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp. 5.300.300,-
-

D.11 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahun 2024 dan Tahun 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Operasional lainnya	5,300,300	134,002,998	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-
Penjualan Alat Kantor	-	-	-
Beban Diserahkan Ke Masyarakat	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5,300,300	134,002,998	-

Pos Luar Biasa
Rp. 0

D.12 Pos Luar Biasa

Rincian Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Pos Luar Biasa
Tahun 2024 dan Tahun 2023*

URAIAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Ekuitas Awal
Rp.
586.599.041,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 586.599.041,- dan Rp. 939.888.768,-

*Defisit LO
Rp
(19.629.395.881)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (4.047.879.098,-) dan Rp. (4.047.879.098,-)

*Dampak
Kumulatif Rp 0*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp 0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Atas
Beban Rp 0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Tahun Anggaran 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.
0,-*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0-

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp. 0'-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 ,- dan Rp.0- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain Lain
Rp 0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp
31.539.774.106'-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.539.774.106- dan Rp. 3.885.581.653- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Transaksi Antar Entitas	31.539.774.106
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	31.539.774.106

Diterima dari
Entitas Lain.
Rp 0,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 DDEL sebesar Rp. 0,- sedangkan 31 Desember 2023 DKEL sebesar Rp.0,-

Transfer Masuk
dan Keluar.
Rp 0-

E.4.2 Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,-

Pengesahan
Hibah
Langsung.
Rp
10.600.000.000,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.600.000.000,-.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	KPU Tanah Datar	Uang	Rp 94.400.271
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp 94.400.271
Jumlah			No Penerima Hibah

Untuk Hibah Langsung Tahun 2024 KPU Tanah Datar tidak menerima hibah atau bansos

Ekuitas Akhir
Rp.
12.496.977.266,-

E5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal per 31 Desember 2023 dan per 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.496.977.266 ,- dan Rp. 586.599.041,-

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 KPU Kabupaten Tanah Datar Tidak terdapat kejadian kejadian penting setelah tanggal Neraca seperti bencana alam, kebakaran ataupun kesalahan manusia.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

- I. Realisasi anggaran belanja pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 Untuk Belanja Pegawai Telah mencapai target yang diembankan oleh KPU RI selaku eselon 1 yakni sebesar 99,65 % untuk realisasi belanja pegawai. untuk realiasi belanja keseluruhan. Satuan kerja KPU Kabupaten Tanah Datar realisasinya mencapai 94.65 %. Pagu anggaran pada DIPA awal Sebesar Rp. 13.223.847.000. tertanggal 10 Nopember 2022 dan pagu anggaran akhir sebesar Rp. 21.281.033.0000,- pagu anggaran belanja pegawai dan pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.604.424.000 atau 99,27. Sementara untuk total pagu anggaran terealisasi sebesar Rp. 20.143.232.142,- atau 94,65 %
- II. Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 KPU Kabupaten Tanah Datar menerima satu kali DIPA Awal dan 05 (lima) kali DIPA Revisi
- III. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor : 01 Tahun 2024 Tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : BENNY RINALDO

Pejabat Pembuat Komitmen : HENDRA, SH

Pejabat Penandatangan/ : FITRI SARI DEWI, S.IP

Penguji SPM

Bendahara : DONI HENDRA

Pembantu Bendahara : LUCY ANGRAINI

Pembantu Bendahara : ASE KASUMA DEWI, S.IP

LAMPIRAN A1

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	TANAH		-	-	-
B.	PERALATAN DAN MESIN		2.080.134.521	1.188.771.808	891.362.713
1	Mesin Diesel	6	18.500.000	18.500.000	-
2	Alat Angkut	6	785.985.870	485.333.013	300.652.857
3	Scanner	4	800.000	800.000	-
4	Alat Kantor	4	113.845.800	88.567.335	25.278.465
5	Alat Rumah Tangga	4	152.861.290	96.967.862	55.893.428
6	Alat Studio	4	26.417.475	8.642.195	17.775.280
7	Alat Komunikasi	4	12.048.500	11.248.500	800.000
8	Alat Kedokteran	10	13.500.000	1.350.000	12.150.000
9	Alat Khusus Kepolisian	10	6.253.610	2.345.103	3.908.507
10	Alat Peraga Pelatihan	10	8.500.000	850.000	7.650.000
11	Komputer	3	644.356.120	377.308.351	267.047.769
12	Peralatan Komputer	3	297.065.856	96.859.449	200.206.407
C.	GEDUNG DAN BANGUNAN		253.108.000	9.991.104	243.116.896
1	Gedung dan Bangunan	50	253.108.000	9.991.104	243.116.896
D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		0	0	0
E.	ASET TETAP LAINNYA		0	0	0
F.	KDP		0	0	0
G.	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		230.605.045	230.150.038	455.007
1	Scanner	5	24.475.000	24.475.000	0
2	Alat Kantor	5	13.925.400	13.925.400	0
3	Alat Rumah Tangga	5	17.147.800	17.147.800	0
4	Alat Studio	5	11.560.000	11.560.000	0
5	Alat Komunikasi	5	5.701.075	5.701.075	0
6	Alat Pemancar	10	2.033.600	2.033.600	0
7	Alat Laboratorium	15	10.533.300	10.078.293	455.007
8	Komputer Unit	4	123.209.350	123.209.350	0
9	Peralatan Komputer	5	22.019.520	22.019.520	0
H.	ASET SEJARAH		0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			2.333.242.521	1.198.762.912	1.134.479.609
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			230.605.045	230.150.038	455.007

LAMPIRAN A.2

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

BA : 076
 Eselon 1 : 01
 UAPPA W : 0800
 Satuan Kerja : 656134 KPU Kabupaten Tanah Datar

No	Belanja		Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Informasi Akrual	Dokumen Sumber
	Kode Akun	Uraian		Tambah	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	NIHIL	-	-	-	-	-



Batusangkar, 28 April 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran

BENNY RINALDO, SH
 NIP. 19750408 200902 1 005